

SISTEM PERBENTENGAN DALAM JARINGAN NIAGA CENGKIH MASA KOLONIAL DI MALUKU*

The Fortification System in the Spices Monopoly during Colonial Period in Moluccas

Syahrudin Mansyur

Balai Arkeologi Ambon

Jl. Namalatu-Latuhalat, Nusaniwe, Ambon-97118

e-mail: hitam_putih07@yahoo.com

Naskah diterima : 02-04-2014 ; direvisi : 08-08-2014 ; disetujui : 05-09-2014

Abstract

In numbers of colonial archaeological research conducted by Balai Arkeologi Ambon, fort has been identified as the main archaeological remains in the Moluccas. The inventory shown that forts distributed in almost every islands of the Moluccas. Various research that has been conducted in the past are still unable to explain the historical context in this region. This situation was mainly based on the fact that these research only identify singular fort in one area and not the larger spatial context. Adopting the historical-archaeological perspective, this paper tries to understand the historical context of the forts spatial distribution in the moluccas in the relation to the spice monopoly in the region. This research found that the success of the spice trade monopoly is related to the fortification system developed by VOC in this region.

Keywords: Fort, Colonial, Clove, Moluccas

Abstrak

Rangkaian hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Ambon khususnya bidang arkeologi kolonial menempatkan benteng sebagai salah satu tinggalan arkeologi yang dominan di wilayah Maluku. Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa bangunan benteng tersebar di hampir setiap pulau di Maluku. Berbagai hasil penelitian yang bersifat eksploratif tersebut dirasakan tidak mampu menjelaskan konteks sejarah sebaran benteng yang ada di wilayah ini. Hal ini disebabkan karena setiap penelitian yang dilakukan hanya mengidentifikasi bangunan benteng dalam suatu daerah sehingga sebaran benteng tidak dipandang sebagai satu kesatuan konteks ruang wilayah tertentu. Melalui perspektif arkeologi-sejarah, tulisan ini berupaya memperoleh gambaran tentang konteks sejarah sebaran benteng khususnya dalam kaitannya dengan masa monopoli cengkih di Maluku. Dengan demikian, diperoleh kesimpulan bahwa keberhasilan sistem monopoli cengkih masa kolonial di Maluku tidak lepas dari sistem perbentengan yang telah dibangun oleh Belanda (VOC) sejak awal penguasaan mereka di wilayah ini.

Kata Kunci: Benteng, Kolonial, Cengkih, Maluku.

PENDAHULUAN

Kata “benteng” didefinisikan sebagai bangunan tempat berlindung atau bertahan dari serangan musuh, akan tetapi dalam perkembangannya benteng memiliki berbagai fungsi tidak hanya sekedar sebagai tempat

berlindung tetapi juga sebagai pusat aktivitas. Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan benteng-benteng kolonial di Indonesia yang mengalami pergeseran dari institusi keamanan menjadi institusi pemerintahan.

* Naskah awal tulisan ini pernah disampaikan dalam Evaluasi Hasil Penelitian Balai Arkeologi Ambon tahun 2012 dan telah mengalami beberapa revisi.

Bahkan, tidak sedikit benteng-benteng yang dibangun pada masa Kolonial menjadi bagian dalam pertumbuhan dan perkembangan kota. Fort Rotterdam di Makassar dan Nieuw Victoria di Ambon adalah contoh kasus bahwa benteng merupakan embrio lahirnya sebuah kota di Indonesia. Demikian, dalam perkembangannya, benteng menjadi kawasan permukiman yang berfungsi antara lain sebagai pusat pemerintahan, militer serta menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan.

Sejak awal kedatangan Belanda di Maluku, tujuan utama mereka adalah perdagangan rempah-rempah. Hal ini, ditandai dengan hadirnya ekspedisi-ekspedisi dagang Belanda pada akhir abad ke-16 yang berhasil menjalin kerjasama dengan pusat-pusat perdagangan di Maluku (khususnya Hitu dan Banda). Keberhasilan ekspedisi-ekspedisi ini pula yang menjadi titik awal bagi Belanda untuk mendirikan badan usaha yang disebut *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* atau VOC pada tanggal 20 Maret 1602 (Ricklefs, 2010:51). Sebagaimana pedagang Eropa yang lain, pada awal kehadirannya, pedagang-pedagang Belanda berusaha mendirikan loji-loji perdagangan (gudang komoditi) untuk menampung berbagai komoditi khususnya rempah-rempah. Loji-loji inilah yang kemudian dikembangkan menjadi benteng-benteng pertahanan dalam upaya menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku.

Salah satu fungsi benteng kolonial adalah sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan. Hal ini, tampak jelas jika mengamati sistem perbentengan yang dibangun oleh Belanda (khususnya masa VOC) di wilayah Maluku. Pemahaman terhadap sistem perbentengan dalam konteks ini adalah rangkaian perbentengan yang dibangun oleh Belanda (khususnya masa VOC) yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dengan perkataan lain bahwa benteng-benteng yang dibangun oleh Belanda merupakan sebuah jaringan yang membentuk sebuah sistem tata niaga produksi cengkih di Maluku (khususnya di

Pulau Ambon dan sekitarnya sebagai pusat produksi cengkih masa Kolonial).

Berkaitan dengan peninggalan kolonial berupa benteng, berbagai penelitian telah dilakukan oleh Balai Arkeologi Ambon, namun hasil-hasil penelitian yang bersifat eksploratif. Penelitian-penelitian tersebut menempatkan benteng sebagai tinggalan arkeologi yang umum dalam setiap laporan akhir penelitian. Makalah ini dimaksudkan untuk merangkum hasil-hasil penelitian tersebut guna memperoleh gambaran tentang peran benteng dalam konteks masa lalu. Tentu saja, pembahasan dalam makalah ini sangat dibantu oleh sumber-sumber sejarah sebagai bahan analogi sejarah sebagaimana yang umum dalam setiap penelitian arkeologi-sejarah. Terkait dengan berbagai aspek yang belum dapat dijelaskan, tentunya menjadi bahan untuk pelaksanaan penelitian selanjutnya.

Topik makalah ini memberi gambaran tentang upaya Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Belanda dalam rangka menguasai perdagangan rempah-rempah adalah membangun infrastruktur yang dapat mendukung kebijakan monopoli mereka. Infrastruktur ini dapat dilihat pada sistem perbentengan yang ada di Maluku.

METODE

Ruang lingkup pembahasan ini dibatasi pada periode monopoli cengkih masa Kolonial di wilayah Maluku. Sebagaimana sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa periode monopoli cengkih dimulai pada saat Belanda menerapkan kebijakan pemusatan produksi cengkih di Maluku bagian tengah (Pulau Ambon dan sekitarnya) pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan masa kolonial dalam makalah ini merujuk pada masa kekuasaan Belanda (sejak masa VOC hingga masa Hindia Belanda). Sementara itu, ruang lingkup wilayah dalam pembahasan ini merujuk pada Maluku bagian tengah yaitu Pulau Ambon dan sekitarnya sebagai pusat

produksi dalam sistem monopoli cengkih yang diterapkan oleh Belanda.

Penelitian ini menggunakan perspektif arkeologi-sejarah untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan data selain tinggalan kolonial berupa benteng, data historis yang memberi gambaran tentang topik permasalahan juga menjadi data penting untuk menjawab permasalahan. Dengan demikian, studi pustaka dimaksudkan untuk membantu proses analisis dan memperkuat hasil interpretasi dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perdagangan Rempah-Rempah

Perdagangan rempah-rempah khususnya cengkih dan pala, sesungguhnya telah berlangsung jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Maluku pada abad ke-16. Sumber-sumber awal yang menyebutkan keberadaan rempah-rempah sebagai komoditi yang dibutuhkan telah ada dalam berbagai catatan baik di Eropa maupun di Asia. Sumber-sumber teks tertua dari Eropa tentang pala adalah catatan Theophrastus (372-288 BC¹) yang berasal dari Yunani yang menyebutkan bahwa pala tidak datang dari India tetapi dari Arab (Miller, 1969: 58-60). Catatan Arab yang bersumber dari Ibn Khurdadhbih (ca AD² 850) dan Mukhtasar al-'Aja'ib (ca AD 1000) menyebutkan bahwa sumber utama komoditi ini adalah limabelas hari pelayaran dari Pulau Jaba atau Jawa (?) (Tibbetts, 1979: 29 dan 180; Lape, 2000: 51; Tim Penelitian, 2010: 20). Sementara itu, referensi tertua tentang cengkih berasal dari Dinasti Han di Cina (206-220 SM³) yang menyebutkan bahwa cengkih digunakan untuk menyegarkan nafas orang-orang istana dalam rangka bertemu dengan Kaisar (Turner, 2011:xxvi). Bahkan, sebuah penggalian di wilayah Suriah yang menemukan cengkih dalam sebuah wadah keramik tertutup

1 BC : Before Christmas

2 AD : After Dating

3 SM : Sebelum Masehi

bersama dengan sebuah arsip pahatan tanah liat yang diyakini berasal dari masa penguasa Raja Yadihk-Abu, yaitu medio 1721 SM (Turner, 2011: xix). Berbagai sumber yang menyebutkan tentang rempah-rempah di berbagai belahan dunia telah mengkonfirmasi bahwa komoditi ini telah menjadi komoditi utama dalam perdagangan global sejak ribuan tahun yang lalu.

Meski catatan historis dan bukti arkeologis tentang rempah-rempah telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, namun sumber-sumber teks yang menyebut secara definitif tentang sumber utama komoditi rempah-rempah baru muncul sekitar abad ke 15. Teks pertama bertahun 1462, dari Ahmad ibn Majid (yang menakhodai kapal Vasco da Gama dari Malindi ke India). Sumber kedua dari Sulaiman ibn Ahmad al-Mahri, yang bertahun 1511. Keduanya mengoreksi nama *Bandan* sebagai pengasil pala dan juga menyebut secara singkat sumber rempah yang lain seperti Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan (Tibbetts 1979: 14-15; Lape, 2000: 51; Tim Penelitian, 2010: 20). Sumber-sumber Portugis yang berasal dari periode yang sama juga menyebut bahwa tanaman cengkih hanya tumbuh di pulau-pulau kecil di Ternate, Tidore, Makian dan Motir (Pires, 1515: 214-19; Pigafetta, 1524: 79; Reid, 2011: 5). Sejak periode ini pula, penjelajahan bangsa Eropa untuk mencari sumber rempah-rempah mulai massif dilakukan, selain Portugis adalah Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis dan Denmark.

Upaya penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap sumber utama rempah-rempah dilakukan karena keuntungan besar yang diperoleh dari perdagangan rempah-rempah ini. Di Eropa, rempah-rempah merupakan komoditi yang memiliki kegunaan dalam kehidupan mereka sehingga banyak dicari meskipun dengan harga yang mahal. Sebagai tanaman yang tahan lama, rempah-rempah digunakan sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, dan bahan pewangi. Rempah-rempah juga disebut sebagai komoditi eksotik yang

disajikan dalam perjamuan di kalangan kaum bangsawan di Eropa. Eksotisme rempah-rempah dalam kehidupan orang-orang Eropa, tidak lepas dari jarak yang harus ditempuh mulai dari asal komoditi ini hingga tiba dan dikonsumsi oleh orang-orang Eropa (Turner, 2011: 49-50).

Sebelum dikuasai oleh pedagang-pedagang Eropa, perdagangan rempah-rempah berada di bawah kendali pedagang-pedagang Asia khususnya Cina dan Arab. Para ahli meyakini bahwa jalur perdagangan rempah-rempah dimulai dari sumbernya di Kepulauan Maluku yang kemudian dibawa ke pelabuhan-pelabuhan transit di Asia yaitu Malaka dan India. Jalur ini kemudian masuk ke wilayah Arab yaitu pusat-pusat perdagangan yang ada di Basra, Jeddah, Muskat atau Aqaba. Para pedagang Arab kemudian membawa komoditi ini masuk ke Eropa melalui mediterania untuk masuk ke pasar-pasar Eropa yang ada dekat pesisir pantai: Marseilles, Barcelona, dan Ragusa. Dari pusat-pusat perdagangan inilah kemudian komoditi rempah-rempah menyebar ke seantero Eropa. Keuntungan besar yang diperoleh dari perdagangan rempah-rempah kemudian menarik minat para pedagang Eropa untuk mendapatkan komoditi ini langsung dari sumbernya (Turner, 2011: 5 dan 50). Sejak abad ke-15, berbagai penjelajahan dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol untuk menemukan sumber utama rempah-rempah. Upaya ini kemudian diikuti oleh Belanda, Inggris dan bangsa Eropa yang lain sejak akhir abad ke-16.

Ekspedisi pertama pedagang Belanda ke nusantara adalah ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Gerrit van Beuningen yang tiba di Banten pada tanggal 27 Juni 1596 (Suratminto, 2008: 1). Ekspedisi selanjutnya yang dikirim pada tahun 1599 berhasil mencapai Maluku. Ekspedisi inilah yang berhasil membawa sejumlah rempah-rempah dengan keuntungan yang mencapai 400 persen (Ricklefs, 2010: 51). Kapal-kapal Inggris kemudian menyusul pada tahun 1601 di bawah pimpinan Kapten James Lancaster yang melakukan pelayaran ke Banten dan

mendirikan pos perdagangan di Ternate dan Banda (Hanna, 1983: 15; Turner, 2011: 39). Sejak keberhasilan ekspedisi pedagang-pedagang Eropa ke wilayah sumber utama rempah-rempah, maka perdagangan rempah-rempah kemudian beralih ke tangan para pedagang Eropa sekitar abad ke-16 hingga abad ke-18.

Sistem Monopoli Cengkih Masa Kolonial

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa ruang lingkup periode kolonial yang dimaksudkan dalam pembahasan ini dibatasi pada periode penguasaan Belanda yaitu akhir abad ke-16. Oleh karena itu, pembahasan berikut ini lebih menekankan pada upaya-upaya yang ditempuh oleh VOC maupun pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah khususnya cengkih. Berbagai keberhasilan VOC dalam hubungannya dengan wilayah Maluku secara khusus dan wilayah nusantara secara umum telah mengantarkan mereka menguasai dan berhasil menerapkan kebijakan monopoli cengkih di Maluku sejak abad ke-17 hingga abad ke-19.

Berbagai upaya yang ditempuh oleh Belanda dalam upaya monopoli perdagangan rempah-rempah di nusantara, tidak terlepas dari berbagai keberhasilan yang dicapai sejak pertamakali datang ke wilayah nusantara. Berawal dari keberhasilan ekspedisi pertama sejak tahun 1599, Belanda kemudian membentuk badan usaha yang disebut dengan VOC pada tahun 1602. Selain dimaksudkan untuk menyatukan badan-badan usaha yang ada di Belanda, pembentukan VOC juga dimaksudkan untuk menghadapi persaingan dengan pedagang-pedagang Eropa yang lain. Keberhasilan selanjutnya yang mengantarkan Belanda mencapai hegemoni perdagangan rempah-rempah adalah keberhasilan mereka mengambil alih pusat-pusat perdagangan yang ada di wilayah Asia, khususnya Malabar di India dan Malaka. Pusat-pusat perdagangan ini direbut oleh Belanda sejak pertengahan abad ke-17, yaitu Malaka pada tahun 1641 dan Malabar pada tahun 1661-1663 (Turner,

Tabel 1. Sebaran Benteng Kolonial (Eropa) yang ada di Pulau Ambon dan sekitarnya

No	Nama Benteng	Lokasi		Bangsa Pendiri	Jenis Benteng	Kondisi	Tahun Pendirian
		Pulau	Desa/Kota				
1	Nieuw Victoria	Ambon	Ambon	Portugis (Belanda)	Kasteel/ Groote Fort	Utuh	1575 (1754)
2	Leiden (Enkhuizen)	Ambon	Hitu Lama	Belanda	Redoubte/ Blockhuis	Tinggal Puing (masih dapat diidentifikasi)	1599 (1656)
3	Hectoria (Oma)	Haruku	Oma	Belanda	Redoubte/ Blockhuis	Tinggal Puing (masih dapat diidentifikasi)	1627/ 1644/ 1656
4	Middelburg	Ambon	Passo	Belanda	Redoubte/ Blockhuis	Hampir Musnah	1625 (1686)
5	Hollandia (Honimua)	Saparua	Siri Sori	Belanda	Redoubte/ Blockhuis	Tinggal Puing (masih dapat diidentifikasi)	1626/ 1654
6	Rotterdam	Ambon	Larike	Belanda	Redoubte/ Blockhuis	Hampir musnah	1633
7	Amsterdam	Ambon	Hila-Kaitetu	Belanda	Blockhuis/ Klein Fort	Utuh (sudah dipugar)	1637
8	Vlessingen (Ureng)	Nusa Telu	Ureng	Belanda	Battery	Hampir musnah	1638
9	Sonder Naam (Seith)	Ambon	Seith	Belanda	Redoubte/ Blockhuis	Musnah (tidak dapat diidentifikasi)	1643
10	Overburg	Seram	Luhu	Belanda	Redoubte/ Blockhuis	Hampir musnah	1644
11	Beverwijk	Nusalaut	Sila	Belanda	Redoubte/ Blockhuis	Hampir musnah (telah dipugar) ⁴	1654
12	Haarlem	Ambon	Negeri Lima	Belanda	Redoubte/ Blockhuis	Hampir musnah ⁵	1655/ 1817
13	Hoorn	Haruku	Pelauw	Belanda	Klein Fort	Utuh (telah dipugar)	1656
14	Delft	Saparua	Porto	Belanda	Redoubte/ Blockhuis	Tinggal Puing (tidak dapat diidentifikasi)	1656
15	Wantrouw	Manipa	Tumalehu	Belanda	Redoubte/ Blockhuis	Hampir musnah	1644
16	Duurstede	Saparua	Saparua	Portugis (Belanda)	Groote Fort	Utuh (telah dipugar)	1676/ 1691
	Defensie/Cosburg/ Oostenburg	Buru	Kayeli	Belanda	Klein Fort	Hampir musnah	1657/ 1778/ 1785
18	Ouw	Saparua	Ouw	Belanda	-	Tinggal Puing	-
19	Rohomoni	Haruku	Rohomoni	Belanda	Battery	Hampir musnah	-
20	Nieuw Zeelandia	Haruku	Haruku	Belanda	Klein Fort	Hampir Musnah	1626/ 1655

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

⁴ Benteng Beverwijk yang ada di Sila (Nusalaut) pada tahun 2007 hanya menyisakan dinding dengan kondisi kerusakan pada bagian dalam bangunan. Kondisi benteng pada saat itu hampir sama dengan benteng Wantrouw saat ini. Benteng Beverwijk kemudian dipugar pada tahun 2009-2010 oleh Pemerintah Propinsi Maluku hingga kondisinya saat ini.

⁵ Saat ini Benteng Haarlem telah musnah akibat bencana jebolnya tanggul Way Ela pada 25 Juli 2013



Gambar 1 dan 2: Kondisi Benteng Beverwijk sebelum (kiri) dan setelah (kanan) dipugar.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Ambon, 2007 dan 2012)

2011: 40). Pada periode yang sama pula, wilayah-wilayah perdagangan di Nusantara termasuk Banten sebagai wilayah produksi lada dan Makassar sebagai bandar transit perdagangan cengkih dan pala berhasil direbut yaitu Makassar pada tahun 1667, dan memperoleh hak monopoli perdagangan lada di Lampung (yang saat itu berada di bawah kekuasaan Banten) pada tahun 1682.

Sementara itu, dalam konteks lokal di wilayah Maluku, berbagai rangkaian keberhasilan dicapai oleh Belanda dalam upaya monopoli cengkih. Diawali dengan keberhasilan mereka merebut pusat kekuasaan Portugis di Ambon pada tahun 1605 hingga keberhasilan mereka membatasi perdagangan rempah-rempah oleh Inggris dengan adanya Perjanjian Breda pada tahun 1667. Selain itu, rangkaian keberhasilan ini juga melibatkan hubungan antara Belanda dengan penguasa-penguasa lokal, diantaranya keberhasilan Belanda memaksakan sebuah perjanjian dengan Kesultanan Ternate untuk memusatkan produksi cengkih di wilayah Kepulauan Lease dan larangan produksinya di luar wilayah tersebut. Belanda juga berhasil mematahkan perlawanan penguasa-penguasa lokal di wilayah Ambon dan sekitarnya sejak awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-17, diantaranya; Hitu, Iha, dan Hoamoal (Mansyur, 2012: 90).

Dalam penilaian H.J. de graaf (1977),

periode pemerintahan Gubernur de Vlaming (1647-1656) merupakan periode penting penataan perekonomian mengenai monopoli perdagangan cengkih yang dijalankan oleh Belanda melalui perusahaan dagangnya yaitu VOC. Selanjutnya, H.J. de Graaf, bahkan menyebut bahwa periode tersebut merupakan periode ekonomi cengkih terpinin, dimana Gubernur de Vlaming berhasil mematahkan pengaruh Kesultanan Ternate dan Tidore dalam perdagangan cengkih di Kepulauan Maluku. Hal ini, terutama disebabkan adanya perjanjian antara pihak Belanda dan kedua Kesultanan tersebut untuk menebang seluruh pohon cengkih yang ada di wilayah masing-masing, sehingga cengkih hanya boleh diproduksi di Ambon dan Lease sebagai wilayah yang dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Demikian halnya, pedagang-pedagang lain khususnya pedagang dari Makassar tidak lagi memperoleh akses untuk memperoleh komoditi ini di Hoamual dan wilayah lain di Maluku. Praktis dengan kondisi seperti ini Belanda lebih leluasa menjalankan monopoli cengkih di Maluku (de Graaf, 1977: 171-173). Dalam berbagai hal, kebijakan de Vlaming untuk mencapai hak monopoli cengkih memiliki kesamaan dengan apa yang telah dilakukan oleh Jan Pieterzoon Coen di Kepulauan Banda untuk memperoleh hak monopoli pala di Kepulauan Banda (Mansyur, 2013: 47).

Terkait dengan upaya menuju monopoli cengkih, pihak VOC menerapkan berbagai kebijakan untuk memantapkan sistem ini, di antaranya:

1. Meredam perlawanan penguasa-penguasa lokal terkait dengan perdagangan cengkih, khususnya wilayah Hitu, Iha, dan Hoamual. Setelah meredam perlawanan penguasa lokal tersebut, VOC semakin leluasa untuk membuat konflik internal di antara para penguasa lokal. Berbagai tindakan yang dilakukan, di antaranya: di Hitu misalnya dilakukan dengan memindahkan pusat kekuasaan Kerajaan Hitu dan memisahkan pihak penguasa lokal yaitu Empat Perdana Hitu. Tindakan ini, praktis melemahkan kekuasaan Kerajaan Hitu pada saat itu. Tindakan serupa juga dilakukan di Iha yaitu merelokasi penduduk Iha ke suatu tempat di Hoamual. Selain itu, VOC juga menyerahkan wilayah kekuasaan Iha kepada pihak-pihak yang dapat diajak kerjasama. Sementara itu, di Hoamual VOC juga melakukan relokasi penduduk ke berbagai tempat di Maluku.
2. Sejak awal, VOC menjalankan *hongitochten* atau ekspedisi ke berbagai wilayah di Maluku untuk menghancurkan tanaman cengkih. Ekspedisi setidaknya memiliki dua tujuan yaitu; *pertama*, meredam produksi cengkih sehingga harganya tetap terkontrol, dan *kedua*, menutup akses bagi pedagang gelap (saat itu, VOC melarang pedangan lokal untuk melakukan kontak dengan pedagang-pedagang lain) - terutama pedagang dari Makassar) yang sering melakukan kontak dagang dengan beberapa tempat wilayah Maluku.
3. Keberhasilan VOC merelokasi pemukiman masyarakat lokal dari daerah perbukitan ke daerah pesisir sebagai upaya untuk memudahkan pengawasan terhadap masyarakat di Kepulauan Lease.
4. Pada masa pemerintahan van Speult tahun 1625, VOC membuat kebijakan untuk melakukan penanaman besar-besaran

pohon cengkih di Leitimor dan Lease, dimana kedua daerah ini berada di bawah kontrol VOC. Kebijakan ini ditempuh karena tidak dapat bekerjasama dengan Hoamual terkait dengan perdagangan cengkih, daerah Hoamual pada saat itu merupakan penghasil cengkih terbesar di Maluku bagian tengah.

5. Keberhasilan VOC memaksakan sebuah perjanjian dengan pihak Kesultanan Ternate pada tahun 1652 untuk memusatkan produksi cengkih di Kepulauan Lease dan pelarangan produksi cengkih di luar wilayah tersebut. Sebelum perjanjian ini, di Maluku bagian tengah terdapat beberapa tempat yang menjadi pusat produksi cengkih yaitu Hoamual dan Hitu. Dalam Perjanjian ini juga disebutkan bahwa pihak VOC akan membayar kompensasi setiap tahun kepada Kesultanan Ternate. Dengan perjanjian ini pula, Hoamual sebagai penghasil utama cengkih yang juga merupakan wilayah Kesultanan Ternate (dengan adanya perwakilan pihak Ternate yang disebut *Gimelaha*) semakin terjepit dalam menghadapi pihak VOC.
6. Membangun sistem perbentengan di wilayah yang telah ditetapkan sebagai pusat produksi cengkih (Kepulauan Lease). Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan, sistem ini sekaligus berfungsi sebagai infrastruktur pendukung sistem tata niaga komoditi cengkih. Hal ini tampak pada tipe atau jenis benteng yang dibangun di wilayah Kepulauan Lease yang sebagian besar adalah tipe *blockhuis*. Tipe benteng seperti ini lebih mengutamakan fungsi bangunan sebagai gudang komoditi. Pendukung lain adalah setiap *blockhuis* yang dibangun selalu dilengkapi dengan dermaga untuk mengapalkan cengkih ke pusat pengumpul yang lebih besar (Mansyur, 2013: 48-50).

Sejak periode ini, perdagangan cengkih dalam konteks perdagangan global

telah berada di tangan Belanda sebagai penguasa tunggal komoditi cengkih. Aspek penting yang menjadi perhatian Belanda sejak saat itu adalah mempertahankan produksi cengkih di Maluku agar harga jualnya tidak turun terlalu jauh terutama di Eropa sebagai pasar utama komoditi rempah-rempah. Oleh karena itu, kebijakan untuk melanjutkan ekspedisi “*Hongietochten*” dilakukan untuk mempertahankan keseimbangan produksi cengkih. Ekspedisi ini tidak hanya di luar pulau Ambon dan Kepulauan Lease sebagai pusat produksi cengkih, tetapi juga di kedua wilayah tersebut ketika produksi cengkih melambung tinggi yang menyebabkan harga jualnya jatuh di pasaran (Mansyur, 2013: 47).

Gambaran Umum Sistem Perbentengan di Maluku

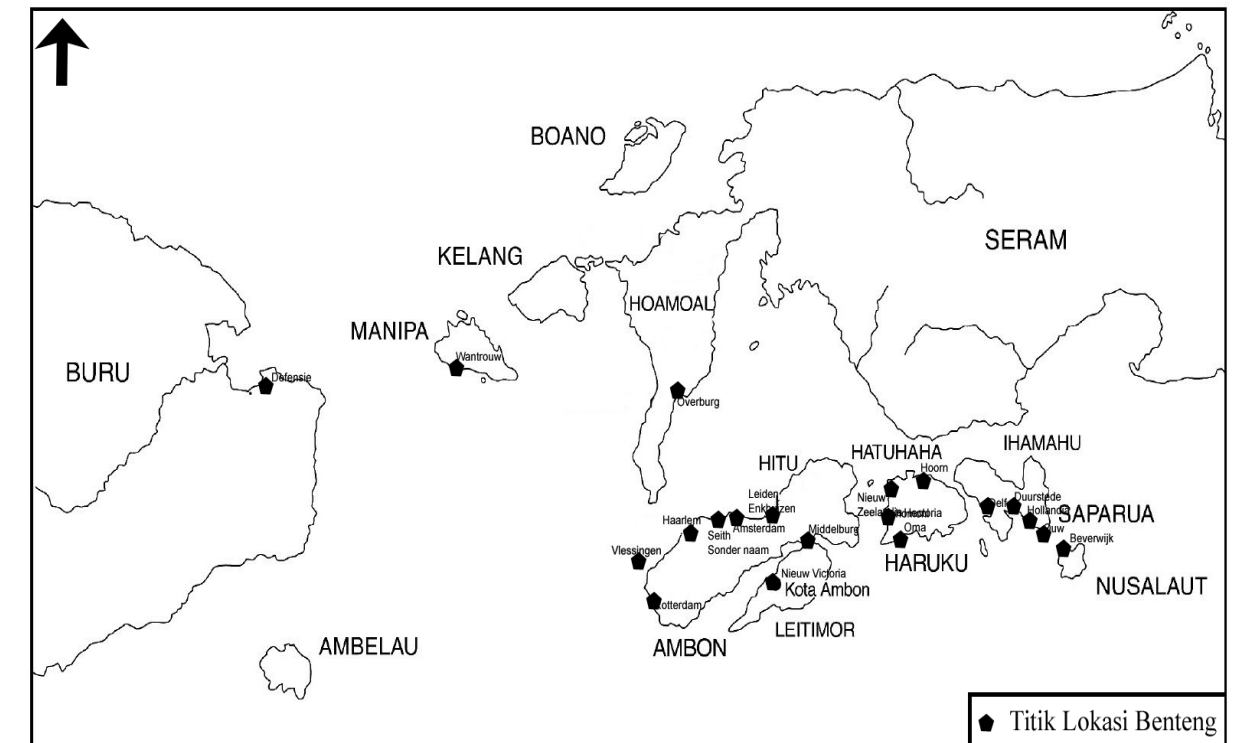
Secara umum, benteng merupakan bangunan yang berfungsi sebagai simbol pertahanan. Namun, seiring berbagai aktivitas yang dipusatkan dalam benteng termasuk aspek ekonomi dan sosial sehingga mempengaruhi fungsi benteng sebagai pusat administrasi, pemerintahan, dan perdagangan. Pergeseran fungsi terjadi pada benteng-benteng yang dibangun oleh perusahaan dagang bangsa Eropa masa lalu (Marihandono, 2008:3). Hal ini, karena bentuk benteng berupa tembok (dinding) keliling yang dilengkapi dengan senjata sehingga memberi rasa aman terhadap ancaman yang datang dari luar. Tentu saja, pergeseran fungsi tersebut disertai dengan berbagai fasilitas yang dapat mendukung aktifitas yang dipusatkan dalam benteng. Gill (1995), bahkan menyebut bahwa benteng identik dengan dominasi kekuasaan, eksploitasi ekonomi dan simbol kekuasaan asing di suatu daerah yang dikuasai oleh raja-raja dan penguasa pribumi (Gill, 1995: 59; Marihandono, 2008:3; Mansyur, 2011: 25).

Berdasarkan bentuk dan ukurannya, benteng dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu:

1. *Pagger*: merupakan bentuk sederhana sebuah benteng yang hanya dilengkapi dengan pagar kayu keliling;

2. *Battery/beukery*: bangunan pertahanan kecil yang berdiri sendiri untuk menempatkan sejumlah meriam atau senjata, pada umumnya berbentuk setengah lingkaran dan persegi empat dengan ukuran $\pm 4 \times 4$ meter dengan tinggi 4 meter;
3. Berdasarkan aspek ukuran dan bentuknya, jenis kedua dapat dikelompokkan dalam beberapa tipe yaitu; *Redoubtee*, kubu pertahanan yang berukuran lebih besar jika dibandingkan dengan *battery*, yaitu ± 8 hingga 10 meter, berbentuk persegi untuk menempatkan meriam. Jenis ini umumnya dapat dikembangkan menjadi benteng yang lengkap; *Blockhuis*, bangunan yang pada awalnya lebih difungsikan sebagai gudang komoditi, pada umumnya berbentuk persegi, terbuat dari kayu, dan batu atau beton. Kemudian, dapat dikembangkan sebagai benteng lengkap dengan adanya bastion (sudut yang menjorok keluar, berbentuk segitiga atau melingkar), yang berfungsi sebagai pos pertahanan; *Klein fort*, bangunan pertahanan, umumnya berbentuk persegi, memiliki bastion. Jenis ini memiliki ukuran lebih besar dibanding *redoubtee*, dan memiliki berbagai bangunan yang difungsikan sebagai kantor, maupun gudang. Namun, jenis ini lebih mengutamakan fungsi pertahanan dengan adanya bastion;
4. *Groote forten/Kasteelen*: bangunan pertahanan, umumnya berbentuk persegi atau bulat. Jenis ini berukuran lebih besar dibanding *klein fort*, dengan berbagai fasilitas di dalamnya, seperti kantor, barak militer, gereja, rumah sakit dan tempat tinggal. Jenis ini pada umumnya merupakan embrio sebuah kota, seperti Fort Rotterdam di Makassar dan Nieuw Victoria di Ambon (Pusat Dokumentasi Arsitektur, 2008: 5 dan 7; Mansyur, 2011: 25-26).

Dalam perkembangannya, setiap tipe atau jenis-jenis benteng mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhannya. Jenis *redoubtee* dan *blockhuis* misalnya dapat



Gambar 3: Peta Sebaran Benteng (yang ditandai dengan titik hitam) di Wilayah Pulau Ambon dan Sekitarnya (diolah dari berbagai sumber)

ditingkatkan menjadi jenis *klein fort* dengan menambahkan tembok keliling dengan ukuran yang lebih besar. Contohnya, benteng Amsterdam di Hila pada awalnya hanya berupa *blockhuis*, kemudian diperkuat dengan tembok keliling dengan tambahan bastion pada tiap sudutnya. Demikian halnya, pada tipe *pagger* yang awalnya hanya berupa pagar keliling yang terbuat dari kayu atau bambu,



Gambar 4: Benteng Amsterdam adalah tipe paling tepat dalam kaitannya dengan jaringan niaga cengkih karena memiliki fungsi sebagai pertahanan sekaligus perdagangan.

(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Ambon, 2012)

pada umumnya ditingkatkan menjadi sebuah *blockhuis* maupun *klein fort* bahkan *Groote forten* jika suatu lokasi atau tempat dianggap memiliki peran yang penting. Sebagian besar benteng yang ada di Maluku berkembang dari tipe seperti ini. Selain pertimbangan peran suatu wilayah, kondisi politik juga menjadi pertimbangan utama dalam meningkatkan tipe dan fungsi suatu benteng.

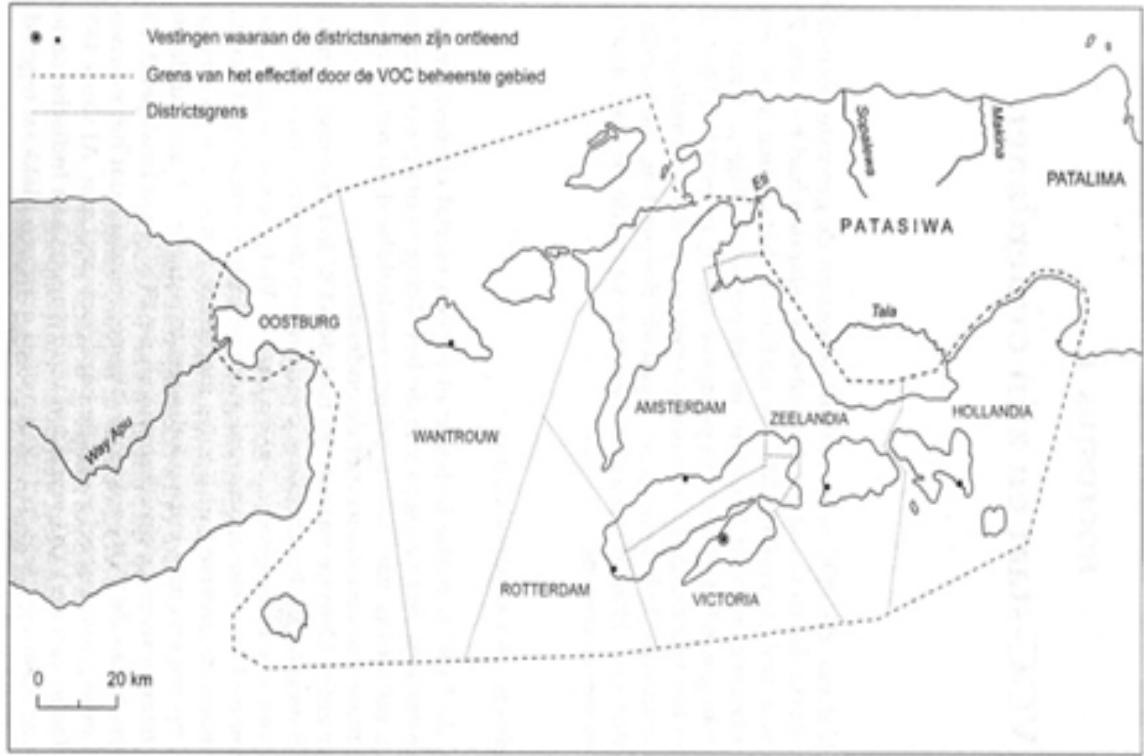
Benteng sebagai Pendukung Utama Jaringan Niaga Cengkih

Dalam konteks upaya menguasai perdagangan rempah-rempah, VOC menyadari bahwa sebagai wilayah kepulauan, sistem monopoli harus didukung dengan jaringan niaga berupa benteng sebagai pos perdagangan maupun pos pengawasan. Hal ini tampak dalam setiap perjanjian yang melibatkan VOC dengan para penguasa lokal di wilayah ini.

Perjanjian antara Belanda dengan Hitu pada tahun 1605 merupakan cikal bakal monopoli cengkeh oleh Belanda. Poin penting

dalam perjanjian tersebut menyebutkan bahwa hanya pedagang Belanda yang boleh membeli cengkih dan poin kedua bahwa Belanda diperbolehkan mendirikan benteng dimana saja dianggap perlu. Perjanjian serupa dengan pihak Ternate dilakukan pada tahun 1607. Pada tahun 1609, perjanjian ini diperbaharui dan bertentangan dengan perjanjian sebelumnya terutama menyangkut izin mendirikan benteng di wilayah Maluku sehingga Belanda tidak bebas lagi mendirikan benteng di tempat-tempat yang dianggap penting (de Graaf, 1977: 92-93; dan Leirissa, 1973: 88-89). Akan tetapi, situasi perdagangan di wilayah ini (terutama di Hoamoal) yang melibatkan para pedagang Melayu, Jawa, dan terutama dari Makassar merugikan pihak Belanda. Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Belanda mulai mendirikan pos-pos militer untuk mengawasi aktivitas pedagang-pedagang tersebut (Keuning, tanpa tahun: 38; dan Leirissa, 1973: 92).Sebagian besar benteng dengan tipe *redoubte* atau *blockhuis*

mulai diperkuat sejak masa pemerintahan Arnold de Vlaming van Oudshoorn (1647-1651 dan 1654-1656). Pada dasarnya, kebijakan ini ditentang oleh Steven van der Haghen yang tidak menyetujui pendirian benteng karena bertentangan dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, Steven van der Haghen juga berpandangan bahwa apabila sistem benteng yang akan diterapkan untuk mencegah “perdagangan gelap”, maka dibutuhkan setidaknya 25 benteng hanya untuk wilayah Maluku tengah. Tentu saja, pandangan ini akhirnya tidak disetujui oleh Pejabat Belanda yang lain terutama oleh Jan Pieterzoon Coen dan Blocq Martensz yang menempuh kebijakan yang keras untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Demikian, dalam kenyataannya sistem perbentengan ini kemudian menjadi faktor penting bagi Belanda dalam menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk



Gambar 5. Peta yang menggambarkan pembagian wilayah di Maluku bagian tengah (Sumber: Knaap, 2004: 38)

Tabel 2. Produksi Cengkih di Pulau Ambon dan sekitarnya pada abad ke-17.

	ca. 1620	ca. 1647	ca. 1670	ca. 1695
In Amsterdamse Ponden				
Ambelau	-	10.000	-	-
Manipa	8.000	25.000	-	-
Hoamoal	176.000	150.000	-	-
Hitu	116.000	120.000	123.000	188.000
Larike	76.000	50.000	77.000	101.000
District Victoria	20.000	105.000	130.000	181.000
Haruku	4.000	20.000	71.000	80.000
Saparua en Nusalaut	-	20.000	188.000	174.000
Totaal	400.000	500.000	589.000	724.000
In Procenten:				
Ambelau	-	2	-	-
Manipa	2	5	-	-
Hoamoal	44	30	-	-
Hitu	29	24	21	26
Larike	19	10	13	14
District Victoria	5	21	22	25
Haruku	1	4	12	11
Saparua en Nusalaut	-	4	32	24
Totaal	100	100	100	100

(Sumber: Knaap, 2004: 297)

mengawasi “perdagangan gelap”, tetapi juga menjadi pendukung utama bagi jaringan niaga yang dibangun oleh Belanda di Maluku terutama dalam hal mengumpulkan komoditi cengkih.

Jika mengamati keletakan setiap benteng di Pulau Ambon dan sekitarnya yang sebagian besar berada di daerah pesisir, jelas bahwa fungsi utama benteng selain pertahanan juga fungsi perdagangan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengiriman komoditi cengkih ke pusat pengumpul yang lebih besar, dalam hal ini Kota Ambon. Selain itu, berdasarkan pengamatan di lokasi benteng-benteng yang ada menunjukkan bahwa terdapat indikasi adanya elemen tambahan pada setiap benteng berupa dermaga.

Tipe benteng yang sebagian besar berupa *blockhuis* juga menunjukkan bahwa fungsi sebagai gudang komoditi menjadi pertimbangan utama dalam mendirikan

benteng. Tipe benteng seperti ini tampak jelas pada Benteng Amsterdam di Hila dan Benteng Beverwijk di Sila. Penelusuran sumber-sumber sejarah berupa data pictorial juga menunjukkan bahwa sebagian besar benteng di Pulau Ambon dan sekitarnya merupakan tipe *blockhuis*. Bentuk umum pada tipe ini adalah berbentuk persegi dengan bangunan yang menjulang tinggi dan terdiri atas beberapa lantai. Lantai pertama kemungkinan merupakan ruang yang berfungsi sebagai gudang, lantai kedua merupakan ruang bagi petugas. Lantai ketiga yang umumnya merupakan lantai terakhir (tempat tertinggi) adalah area terbuka sehingga memungkinkan untuk mengawasi daerah sekitarnya. Lantai ketiga ini juga umumnya terdapat *embrasure* atau ceruk bidik untuk menempatkan meriam.

Jika dihubungkan dengan peta pembagian wilayah di Maluku bagian tengah (gambar 2), tampak jelas bahwa pada

setiap pembagian wilayah yang dikuasai oleh Belanda terdapat titik lokasi benteng. Penempatan benteng sesuai dengan pembagian wilayah tersebut jelas menunjukkan fungsi benteng sebagai pusat administrasi sekaligus pos perdagangan dan pos pengawasan terhadap perdagangan cengkih masa itu. Dalam peta pembagian wilayah tersebut wilayah Ambon dan Kepulauan Lease dibagi atas lima wilayah yaitu; Jasirah Leitimor dimana Benteng Victoria sebagai pusat utama administrasi dan perdagangan, Jasirah Leihiu terdapat dua pusat administrasi dan perdagangan yaitu Benteng Amsterdam dan Benteng Rotterdam, Pulau Haruku terdapat Benteng Zeelandia, dan Pulau Saparua dan Nusalaut terdapat Benteng Hollandia. Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa benteng dibangun untuk melengkapi sistem perbentengan ini yaitu Benteng Beverwijk, Benteng Duurstede di Saparua dan Nusalaut, Benteng Horn di Haruku. Selanjutnya, untuk memudahkan pengiriman produksi cengkih dari Kepulauan Lease ke Kota Ambon, Belanda membuat secara khusus sebuah benteng di Passo yaitu Benteng Middelburg sebagai transit sebelum dibawa ke Kota Ambon. Data pictorial juga menunjukkan bahwa di sekitar lokasi ini, dulunya terdapat sebuah terusan yang menghubungkan Teluk Ambon dan Teluk Baguala. Sementara itu, sejak Belanda berhasil memantapkan sistem monopoli, benteng-benteng di wilayah lain lebih difungsikan sebagai pusat pengawasan, di antaranya; Benteng Wantrouw di Manipa, dan Benteng Ootsburg atau Benteng Defensie di Kayeli, serta Benteng Overburg di Luhu (Seram-Hoamoal).

Peta pembagian wilayah tersebut, sekaligus menunjukkan pusat-pusat produksi cengkih yang telah dikembangkan oleh Belanda. Dalam konteks jaringan niaga yang dibangun oleh Belanda pada abad ke-17, mereka telah membagi wilayah-wilayah produksi serta menempatkan benteng yang merupakan pusat pengumpul sementara. Catatan-catatan Belanda (tabel 2 pada lampiran) menunjukkan bahwa pada

paruh terakhir abad ke-17, daerah-daerah yang menjadi pusat produksi cengkih yang dikembangkan oleh Belanda memiliki produksi cengkih yang tinggi. Sementara itu, di luar daerah-daerah tersebut tingkat produksi cengkih menurun bahkan tidak berproduksi lagi. Hal ini, sekaligus menunjukkan keberhasilan ekspedisi *Hongitochten* di daerah-daerah yang sebelumnya merupakan pusat produksi cengkih sebelum Belanda menerapkan monopoli cengkih. Selain itu, tabel 2 juga menunjukkan bahwa Belanda berhasil meredam produksi cengkih di wilayah Ambalau, Manipa, dan Hoamoal yang merupakan wilayah-wilayah di luar pusat produksi cengkih yang dibangun oleh Belanda. Hal ini dimungkinkan setelah Belanda berhasil meredam perlawanan penguasa-penguasa lokal di wilayah tersebut. Catatan yang menggambarkan produksi cengkih di Maluku bagian tengah juga memberi informasi bahwa setelah tahun 1670 (setelah meredam perlawanan Hoamoal dan sekitarnya), Belanda lebih leluasa mengatur produksi cengkih di wilayah-wilayah yang dikuasainya.

PENUTUP

Kepulauan Maluku telah lama dikenal sebagai penghasil utama komoditi rempah-rempah khususnya cengkih dan pala. Oleh karena itulah, dalam jaringan perdagangan masa lampau kepulauan ini dikenal dengan *“The Spices Islands”*. Daya tarik ini pula yang menjadikan para pedagang asing saling berebut pengaruh untuk memperoleh hak monopoli perdagangan atas kedua komoditi ini. Kehadiran para pedagang Eropa kemudian menjadi aktor utama dalam persaingan tersebut, namun Belanda melalui perusahaan dagangnya yaitu VOC yang akhirnya mendominasi perdagangan cengkih dan pala di Kepulauan Maluku selama lebih dari 200 tahun. Melalui berbagai upaya, VOC berhasil memusatkan produksi kedua komoditi utama yaitu cengkih di Kepulauan Lease dan pala di Kepulauan Banda. Dalam berbagai hal, tinggalan arkeologi yang dapat

kita amati sekarang ini tidak lepas dari konteks kuasa ekonomi yang diterapkan oleh Belanda sejak awal kedatangan mereka di bumi rempah-rempah.

Setelah memaparkan tentang hubungan antara sebaran lokasi benteng yang ada saat ini. Serta melalui kajian historis yaitu membandingkan sumber-sumber sejarah yang memberi gambaran tentang periode kolonial di Maluku diperoleh kesimpulan bahwa keberhasilan sistem monopoli yang dibangun oleh Belanda ditentukan oleh sistem jaringan niaga yang tampak pada sebaran benteng yang ada di pusat-pusat produksi cengkih dan sekitarnya. Dengan demikian, terlepas dari rangkaian keberhasilan Belanda dalam upaya menguasai perdagangan rempah-rempah yang berhubungan dengan para pesaing mereka (Portugis, Spanyol, dan Inggris) sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya. Dalam konteks lokal, tidak berlebihan jika disebutkan bahwa jalur diplomasi berperan penting dalam keberhasilan Belanda menguasai perdagangan cengkih di Maluku. Hal ini tampak jelas dalam setiap klausul perjanjian yang melibatkan Belanda dengan penguasa-penguasa lokal di Maluku selalu disebutkan bahwa penguasa lokal memberi kebebasan kepada Belanda untuk mendirikan benteng di mana pun dianggap perlu.

DAFTAR PUSTAKA

- de Graaf, H.J., 1977. Sejarah Ambon dan Maluku Selatan. Terjemahan Frans Rijoli dengan Judul Asli: *De Geschiedenis van Ambon en de Zuid Molukken*.
- Gill, Ronald Gilbert, 1995, *De Indische Stad op Java en Madoera, Disertasi*. Universitas Delft.
- Hanna, W.A. 1983. *Kepulauan Banda Kolonialisasi dan Akibatnya di Kepulauan Pala*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Keuning, J., tanpa tahun. Orang Ambon, Portugis

dan Belanda: Sejarah Ambon sampai akhir abad ke-17. Terjemahan Frans Rijoli dengan Judul Asli: *Ambonnezen, Portugeezen, Nederlanders: Ambon's Geschiedenis tot het einde van de zeventiende eeuw*.

- Knaap, G. 2004. *Kruidnagelen en Christenen de VOC en de bevolking van Ambon 1656-1696*. Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde (KITLV).
- Lape, Peter Vanderford., 2000. Contact and Conflict in The Banda Island, Eastern Indonesia 11th-17th, *Disertasion*, Department of Anthropology at Brown University.
- Leirissa, R.Z., 1973. Kebijakan VOC untuk mendapatkan Monopoli Perdagangan Cengkeh di Maluku Tengah antara Tahun-Tahun 1615 dan 1652. Dalam *Bunga Rampai Sejarah Maluku (I)*. Jakarta: Lembaga Penelitian Sejarah Maluku.
- Mansyur, Syahrudin., 2011. Jejak Tata Niaga Rempah-Rempah dalam jaringan Perdagangan Masa Kolonial di Maluku. dalam *Kapata Vol. 7 No. 13, November 2011 ISSN 1858-4101: 20-39*. Ambon: Balai Arkeologi Ambon.
- Mansyur, Syahrudin., 2012. Tinggalan Arkeologi Masa Kolonial di Wilayah Kepulauan Maluku: Sebuah Evaluasi Hasil Penelitian. dalam *Kapata Vol. 8 No. 2, November 2012 ISSN 1858-4101: 85-94*. Ambon: Balai Arkeologi Ambon.
- Mansyur, Syahrudin., 2013. Perdagangan Cengkih Masa Kolonial dan Jejak Pengaruhnya di Kepulauan Lease. Makalah dalam Kalpataru Majalah Arkeologi Vol. 22 No. 1, Mei 2013. Jakarta: Pusat Arkeologi Nasional.
- Marihandono, Joko. 2008. Perubahan Peran dan Fungsi Benteng dalam Tata Ruang Kota. Makalah dalam *Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya Vol. 10 No. 1, April 2008*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya-Universitas Indonesia.
- Miller, J.I. 1969. *The Spice Trade of the Roman Empire, 29 B.C. to A.D. 641*. Oxford: Clarendon Press.
- Pigafetta, Antonio., 1524. *First Voyage Around the World, terj. A. Robertson*. Manila: Filipiniana Book Guide, 1969, hal. 1-108.

- Pires, Tome., 1515. *The Suma Oriental of Tome Pires, terj. Armando Cortessao*. London: Hakluyt Society, 1944.
- Pusat Dokumentasi Arsitektur. 2008. Field Survey Report Mid Year Evaluation: The Inventory and Identification of Fort in Indonesia. Disampaikan dalam *Workshop Hasil Identifikasi Benteng di Indonesia Timur*. Jakarta, 12 Juli 2008.
- Reid, Anthony., 2011. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680. Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ricklefs. M.C. 2010. *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008, Cetakan III November 2010*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Suratminto, Lilie., 2008. *Makna Sosio-Historis Batu Nisan VOC di Batavia*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Tibbetts, G.R. 1979. *A Study of the Arabic Texts Containing Material on South-East Asia*. Leiden: E.J. Brill for the Royal Asiatic Society.
- Tim Penelitian, 2010. Kepulauan Banda, Maluku Tengah, Pusat Perdagangan Pala Abad ke-16-19. *Laporan Penelitian Arkeologi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.
- Turner, Jack., 2011. *Sejarah Rempah: Dari Erotisme sampai Imprealisme*. Jakarta: Komunitas Bambu.